



**PEMERINTAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

**TAHUN
ANGGARAN
2019**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
PERUBAHAN (RANHIR RENJA P)
DINAS PERHUBUNGAN**



OLEH:

**DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan di sektor transportasi yang efisien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan strategis yang dinamis seperti globalisasi yang ditandai adanya krisis keuangan global sebagai akibat berlakunya ekonomi pasar; kebijakan otonomi daerah; perubahan kondisi sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha; semakin meningkatnya kepedulian masyarakat kepada kelestarian lingkungan hidup; serta adanya keterbatasan sumber daya alam seperti energi, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui, sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, konsep pembangunan transportasi perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan di sektor transportasi di seluruh nusantara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan salah satu dasar dari Dinas Perhubungan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas yang menjadi pedoman kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala OPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja OPD serta keterkaitan visi, misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dikemukakan bahwa Rencana Kerja OPD sebagai penjabaran Rencana Strategis OPD merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tenggarong, Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Heldiansyah, SH., M.H

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 198902 1 003

DAFTAR ISI

	Hlm.
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN 2018	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja - PD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kab.	
Kutai Kartanegara	9
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD	10
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	21
 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	 23
A. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	23
B. Program dan Kegiatan	24
 BAB IV PENUTUP.....	 26

DAFTAR TABEL

BAB II

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2019	8
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	10
Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	20
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Kutai Kartanegara	21

BAB III

Tabel 3.1. Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019.....	24
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang dalam hal ini adalah dokumen perencanaan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019, yaitu sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021, serta sebagai tindak lanjut atau penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021.

Rancangan Renja Perubahan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 ini disusun dengan mengacu pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019, Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2021, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya yaitu tahun 2017 dan tahun 2018 serta pelaksanaan Renja tahun 2019 sampai dengan Triwulan ke II, untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat, baik melalui hasil Musrenbang ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi serta Nasional maupun pengajuan langsung dari pihak masyarakat

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa: Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra OPD dan Renja OPD disusun berdasarkan:

1. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
2. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

3. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab OPD.

Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud di atas adalah, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumber daya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud di atas, bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pagu indikatif sebagaimana dimaksud di atas, merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud di atas, bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara substansi mengamankan penyusunan Rencana Kerja

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD.

Lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343) :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, RKPD dan Renja – PD Kutai Kartanegara 2019, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 oleh BPK.

1.2. Landasan Hukum

Beberapa peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan Renja OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) tahun 2019 dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan.

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

Kemudian meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang semakin baik, penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai, serta meningkatkan keselamatan lalu lintas dan pelayanan transportasi yang baik dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021).

2. Tujuan

- a. Memberikan arah pembangunan di sektor perhubungan dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2019.
- b. Menyiapkan tolak ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya.
- c. Membantu dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Bagian Awal	: memuat Halaman Judul, Kata Pengantar, Keputusan Kepala OPD, dan Daftar Isi.
BAB I	: Bagian Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB II	: Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2019
BAB III	: Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Tujuan dan Sasaran Renja, Program dan Kegiatan.
BAB VIII	: Penutup.

BAB I. Pendahuluan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan capaian tahun berjalan 2019.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Perubahan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
7. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun berjalan dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel 2.1

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Daerah 2019 dan
Pencapaian Renstra s/d Tahun 2018

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Beberapa permasalahan-permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan Angkutan Jalan

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
 - a) Masih belum tercapainya pelayanan sesuai dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 - b) Belum adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara
 - c) Masih kurangnya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten
 - d) Minimnya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten
- 2) Jaringan Prasarana Angkutan Jalan
 - a) Minimnya ketersediaan halte pada wilayah Kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
 - b) Belum optimalnya fungsi Terminal angkutan umum yang ada
- 3) Fasilitas Perlengkapan Jalan
 - a) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten.
- 4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a) Belum Terlaksananya Pelayanan melalui Mobil Uji Keliling.
- 5) Sumber Daya Manusia (SDM) bidang Angkutan Jalan
 - a) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

- b) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor
- c) Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRL, Evaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir
- d) Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum
- 6) Keselamatan Angkutan Jalan
 - a) Belum adanya pengawasan mengenai standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten.
- b. Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau.
 - 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau untuk melayani jaringan trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
 - b) Belum optimalnya pengawasan terhadap kapal sungai dan danau yang melayani trayek dalam Kabupaten yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang tersedia alur sungai dan danau yang dapat dilayari
 - 2) Jaringan Prasarana Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya pelabuhan sungai dan danau untuk melayani kapal sungai dan danau yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang telah dilayari angkutan sungai dan danau.
 - 3) Keselamatan Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum optimalnya monitoring mengenai pemenuhan standar keselamatan bagi kapal sungai dan danau yang beroperasi pada lintas antar pelabuhan dalam satu Kabupaten.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

- 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Sungai dan Danau
 - a) Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal angkutan sungai dan danau untuk daerah yang telah melayani angkutan sungai dan danau
- c. Pelayanan Angkutan Penyeberangan
 - 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam Kabupaten
 - b) Belum termonitornya ketersediaan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyeberangan dalam kabupaten
 - 2) Jaringan Prasarana Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum optimalnya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran
 - 3) Keselamatan Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum optimalnya pengawasan mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT dan kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Angkutan Penyeberangan
 - a) Belum Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai kompetensi sebagai awak kapal penyeberangan dengan ukuran di bawah 7 GT atau yang beroperasi di lintas penyeberangan dalam Kabupaten.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

d. Pelayanan Angkutan Laut

1) Jaringan Pelayanan Angkutan Laut

- a) Belum termonitornya mengenai ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan
- b) Belum termonitornya ketersediaan kapal laut yang beroperasi pada lintas atau trayek dalam Kabupaten untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan

2) Jaringan Prasarana Angkutan Laut

- a) Masih kurangnya ketersediaan dermaga pada setiap ibukota Kecamatan dalam Kabupaten untuk melayani kapal laut yang beroperasi pada trayek dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran dan tidak ada alternatif angkutan jalan.

3) Keselamatan Angkutan Laut

Belum termonitornya mengenai pemenuhan standar keselamatan kapal dengan ukuran di bawah 7 GT yang beroperasi pada lintas dalam Kabupaten.

2.3.2. **Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan capaian SPM**

Berdasarkan penjabaran Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021, maka keterkaitan tugas pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu “melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan” adalah dalam menunjang pelaksanaan misi ke 5, yaitu: Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah.

Adapun fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara yang diarahkan untuk pelaksanaan Misi ke-5 Kepala Daerah dan Wakil

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada RPJMD tahun 2016-2021, yaitu: Merumuskan kebijakan teknis bidang perhubungan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah, serta perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perhubungan darat, laut, udara, sungai, danau dan penyebrangan, serta di bidang pengendalian dan operasional perhubungan.

Salah satu Program dan Kebijakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD tahun 2016-2021 yang diimplementasikan ke dalam tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu: Program dan kebijakan dalam hal pembangunan dan pemerataan infrastruktur pelayanan publik, yang difokuskan dalam rangka mencapai tujuan untuk menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah, untuk pembangunan di bidang perhubungan mempunyai sasaran: “Meningkatnya Aksesibilitas Antar Wilayah Serta Kualitas Pelayanan Perhubungan”.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut, maka strategi yang akan ditempuh adalah dengan “Revitalisasi Layanan Transportasi Publik”, dengan arah kebijakan:

- 1) Pengembangan jasa layanan transportasi kota yang menghubungkan ke sentra pertanian, kawasan khusus, destinasi pariwisata, dan outlet perdagangan;
- 2) Pengembangan layanan transportasi yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 3) Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan khususnya yang berkaitan dengan transportasi public

2.3.3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan pada Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

- 1) Luasnya Wilayah geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan;
- 2) Tingginya tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan transportasi yang memadai;
- 3) Besarnya Penggunaan kendaraan pribadi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Kurangnya atau berkurangnya angkutan umum;
- 5) Belum optimalnya pelayanan angkutan umum sehingga memberi dampak tingginya penggunaan kendaraan pribadi
- 6) Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup besar dan adanya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;
- 7) Kurang optimalnya system perencanaan pembangunan di bidang perhubungan akan menjadi hambatan dalam pengusulan dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN bagi pembangunan sector transportasi di Kabupaten;
- 8) Masih kurangnya ketersediaan fasilitas lalu lintas yang bisa mengakibatkan kondisi Lalu Lintas yang kurang aman, kurang nyaman, kurang tertib dan kurang terkendali sehingga menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas;
- 9) Masih adanya temuan hasil pemeriksaan yang akan berpengaruh negatif bagi keberlangsungan organisasi;
- 10) Adanya masukan dan kritikan dari masyarakat yang akan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas serta tingginya jumlah dan fatalitas kecelakaan;
- 12) Masih adanya angkutan umum/ darat yang kurang layak atau menyebabkan pencemaran udara yang disebabkan asap kendaraan bermotor roda 4 atau lebih;

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

- 13) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan;
- 14) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan yang memadai;
- 15) Kebutuhan masyarakat akan pentingnya ketersediaan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar
- 16) Prasarana dan fasilitas perhubungan yang kurang responsif gender;
- 17) Semakin meningkatnya jumlah pariwisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga akan membutuhkan jasa transportasi yang memadai;
- 18) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta fasilitas perhubungan;
- 19) Perlunya perencanaan program dan pelaksanaan pembangunan bidang perhubungan yang responsif gender;
- 20) Perlunya revitalisasi terminal yang sudah ada;
- 21) Perlunya revitalisasi dermaga tersebar di Kukar;
- 22) Perlunya ketersediaan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kukar;
- 23) Perlu adanya Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten;
- 24) Adanya kesamaan dalam upaya penanganan permasalahan Transportasi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Pusat;
- 25) Perlunya peningkatan pengelolaan perparkiran di kab.kukar;
- 26) Perlunya peningkatan akuntabilitas kinerja;
- 27) Perlunya peningkatan manajemen pengelolaan data bidang perhubungan.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Beberapa factor yang menjadi peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara, diantaranya adalah:

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

- 1) Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan sesuai Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Terbukanya peluang untuk menyusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan skala Kabupaten berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 3) Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) perhubungan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Adanya Kebutuhan pembangunan perhubungan yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab.Kutai Kartanegara;
- 5) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam RPJPD dan RPJMD Kab.Kutai Kartanegara;
- 6) Adanya Kebutuhan pembangunan yang termuat dalam Tatralok Kab.Kutai Kartanegara;
- 7) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan pembangunan di bidang perhubungan;
- 8) Terbukanya peluang kerjasama dengan pihak akademisi atau perguruan tinggi yang ada di daerah guna meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan;
- 9) Telah tersedianya Akses transportasi jalan darat yang telah menghubungkan sebagian besar wilayah Kabupaten;
- 10) Tersedianya akses transportasi sungai;
- 11) Potensi PAD sector perhubungan yang masih bisa dioptimalkan;
- 12) Terbukanya kesempatan kerjasama dengan pihak swasta dalam bidang jasa transportasi, misalnya dalam hal penyediaan Taxi Kota;
- 13) Adanya penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun lembaga-lembaga pelatihan;
- 14) Ketersediaan alokasi dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

2.3.4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

Isu-isu penting yang akan ditangani dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2017, yaitu:

- 1) Rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mentaati peraturan lalu lintas jalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan;
- 2) Perlu ditingkatkannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara dari sektor perhubungan, yaitu melalui peningkatan retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi parkir, retribusi tambat kapal, retribusi terminal, dan retribusi lainnya di bibiang perhubungan;
- 3) Perlu ditingkatkannya aplikasi teknologi informasi guna mendukung manajemen transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 4) Diperlukan peningkatan kapasitas SDM perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara agar memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Belum optimalnya system perencanaan guna memenuhi kebutuhan pembangunan di bidang perhubungan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 6) Perlunya peningkatan kinerja penyusunan perencanaan program dalam pengusulan program dan kegiatan pada APBD, APBD Provinsi serta APBN bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara
- 7) Diperlukan rencana kebutuhan fasilitas lalu lintas di seluruh wilayah Kabupaten guna ketepatan dalam proses penyediaan fasilitas lalu lintas yang sesuai kebutuhan;
- 8) Belum optimalnya fungsi Terminal dan pelayanan angkutan jalan guna menekan penggunaan kendaraan pribadi;
- 9) Lemahnya kinerja manajemen pengelolaan data untuk menyediakan data dan informasi di bidang perhubungan yang akurat guna

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

terpenuhinya kebutuhan masyarakat maupun Instansi terkait akan ketersediaan data dan informasi terkait pelayanan perhubungan;

- 10) Menjaga akuntabilitas kinerja guna menghindari temuan hasil pemeriksaan;
- 11) Pemberian pelayanan masyarakat sesuai SPM agar meningkatkan kepuasan masyarakat;
- 12) Perlunya peningkatan pemahaman Aparatur tentang tugas pokok dan fungsi dan pembagian tugas yang jelas;
- 13) Perlunya sosialisasi keselamatan dan meningkatkan ketersediaan fasilitas lalu lintas guna membangun kesadaran masyarakat untuk pentingnya mentaati peraturan lalu lintas;
- 14) Pengoptimalan fungsi layanan pengujian kendaraan bermotor agar semakin terpenuhinya angkutan umum/ darat yang layak jalan dan ramah lingkungan.

2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD dan Renstra pada tahun 2019

Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, kemudian penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, serta penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019
Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

- 2.5.1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh
- 2.5.2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

**PROGRAM DAN KEGIATAN RKP
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019**

DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib Perhubungan								DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tenggarong	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100 Persen			4.104.851.259	6.169.740.160	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tenggarong			Jumlah Materai	2000	-	5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	Tenggarong			jumlah tagihan	22	559.131.949	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tenggarong			Jumlah bulan	12	113.091.368	800.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tenggarong			Jumlah bulan	12	259.742.974	300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tenggarong			Jumlah bulan	12	45.000.000	180.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tenggarong			Jumlah paket	1	161.156.435	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Tenggarong			Jumlah lembar	100000	73.720.079	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tenggarong			Jumlah paket	1	10.000.000	80.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tenggarong			Jumlah exp	5000	20.000.000	40.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tenggarong			Jumlah kotak	20000	73.268.294	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tenggarong			Jumlah orang	200	150.000.000	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Tenggarong			Jumlah orang	257	2.634.740.160	2.634.740.160	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Bahan-Bahan Logistik Kantor	Tenggarong			Jumlah Logistik	1000	5.000.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyediaan Jasa Publikasi dan Informasi	Tenggarong & Sanga-Sanga			Jumlah Kegiatan Pameran	6	-	280.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tenggarong	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen			299.432.060	1.300.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tenggarong			Jumlah unit	50	-	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Tenggarong			Jumlah Jasa	9	20.000.000	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tenggarong			Jumlah kali pemeliharaan	1	279.432.060	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor	Tenggarong			Jumlah Gedung Kantor	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tenggarong	Tingkat kepatuhan aparatur	0 Persen			-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Perlengkapannya	Tenggarong			Jumlah Pakaian Dinas (stell)	800	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tenggarong	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	85 Persen			200.000.000	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Tenggarong			Jumlah Peserta Diklat	30 orang	200.000.000	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tenggarong	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100 Persen			300.000.000	1.193.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tenggarong			Jumlah dokumen	8	200.000.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perhubungan	Tenggarong			Jumlah dokumen IKM	1		250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tenggarong			Jumlah dokumen	1		43.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan LKjIP	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan LPPD	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Renja	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Evaluasi Renstra	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Monitoring dan Evaluasi Pegawai serta aset Dinas	Tenggarong			Jumlah Kecamatan	10		100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengembangan Data dan Informasi	Tenggarong			Jumlah dokumen	1	100.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	Penyusunan SPM	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1	-	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Kab.Kukar	Prosentase Jumlah Prasarana (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga Apung) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	82 Persen			1.540.000.000	1.260.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Terminal	Kota Bangun & Muara Jawa			Jumlah unit	2	-	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Halte	Tenggarong			Jumlah unit	3	-	60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Dermaga	Sebulu			Jumlah unit	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Dermaga Kumala	Tenggarong			Jumlah unit	2	300.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Dermaga Aji Imbut	Tenggarong Seberang			Jumlah unit	1	300.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Dermaga Kutai Lama	Anggana			Jumlah unit	1	300.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Berat Dermaga	Muara Kaman			Jumlah unit	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehab Dermaga Apung/Ponton	Kab.Kukar			Jumlah unit	1	-	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
		Kab.Kukar	Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (Traffic/ Warning Light, Rambu Lalin, Pagar Pengaman Jalan, dan Marka Jalan) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	58 Persen					
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kab.Kukar			Jumlah Unit Traffic Light & Warning Light	3	200.000.000	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Marka Jalan	Kab.Kukar			Jumlah (M2)	170	300.000.000	900.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					Jumlah unit alat pengecat marka	2			
		Kab.Kukar	3) Prosentase Jumlah Fasilitas LLAJ (LPJU) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	25 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan LPJU	Kab.Kukar			Jumlah unit	40	50.000.000	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	4)Prosentase Jumlah Fasilitas LLA Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	71 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Sungai	Kab.Kukar			Jumlah unit	10	-	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rambu Laut	Kab.Kukar			Jumlah unit	10	-	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	5) Prosentase Jumlah Alat Uji Kendaraan yang dilakukan Kalibrasi dan Perawatan	100 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Tenggarong			Jumlah unit	9	90.000.000	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan prasarana balai/ gedung pengujian kendaraan bermotor	Tenggarong			Jumlah unit	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Kab.Kukar	1)Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis (Indikator RPJMD)	83 Persen			2.624.838.818	2.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	2)Prosentase Cakupan sarana dan prasarana perhubungan (Terminal, Halte, Pelabuhan Laut/Sungai, Dermaga	94 Persen					DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
	Pembangunan Dermaga	Kab.Kukar (Tanjung Limau Muara Badak, Desa Sebuntal Marang Kayu, Desa Muai Kecamatan Kembang Janggut)			Jumlah Dermaga (Dermaga)	3 Buah	624.838.818	2.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengembangan dan Perluasan Lahan Parkir	Kab.Kukar			Jumlah Lokasi Lahan Parkir yang ditingkatkan/ dikembangkan (Unit)	2 Lokasi	2.000.000.000		DINAS PERHUBUNGAN
	Pembangunan Pelabuhan Umum Desa Muara Badak Ilir	Muara Badak			Jumlah unit	1	-		DINAS PERHUBUNGAN
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kab.Kukar	6) Prosentase Jumlah Prasarana (Gedung Kantor, Tempat Kerja/ Rumah Dinas) yang dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan	100 Persen			500.000.000	8.470.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan Prasarana Gedung Kantor	Tenggarong			Jumlah unit	2	-	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	1)Kelengkapan rambu-rambu lalulintas menuju obyek wisata (sesuai RIPDA) (Indikator RPJMD)	94 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan rambu-rambu lalulintas menuju obyek wisata	Kab.Kukar			Jumlah unit	65	500.000.000	70.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	3)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (Rambu Lalu Lintas, Traffic/Warning Light, Pagar Pengaman Jalan, Marka Jalan) (Indikator RPJMD)	65 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan	Kab.Kukar			Jumlah unit (Rambu: 2250, Traffic/Warning: 15, guardrail: 4000 m, paku marka: 200)	6465	-	2.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	4)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan (LPJU)	57 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan LPJU	Kab.Kukar			Jumlah unit	4000	-	5.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	5)Prosentase Cakupan Ketersediaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai dan Laut (Rambu Sungai dan Laut)	97 Persen					DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
	Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Sungai	Kab.Kukar			Jumlah unit	31	-	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Fasilitas Lalu Lintas Laut	Kab.Kukar			Jumlah unit	2	-	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program peningkatan pelayanan angkutan	Kab.Kukar	1)Indikator RPJMD: Jumlah arus penumpang angkutan umum	3400			500.000.000	3.200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	2)Cakupan pelayanan angkutan sesuai SPM	63 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	3)Rasio Ijin Trayek (Indikator RPJMD)	0 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Pemberdayaan penyelenggara jasa angkutan umum melalui pemberian Subsidi Angkutan Umum	Tenggarong			Jumlah Angkot	30	-	500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Studi Penerapan dan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Pelaksanaan Pengawasan keselamatan Pelayaran Angkutan sungai danau dan penyeberangan	Kab.Kukar			Jumlah Kasus	15	150.000.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengawasan Secara Berkala Prasarana Penunjang Untuk Keselamatan Pelayaran di alur pelayaran Kab. Kukar	Kab.Kukar			Jumlah Kecamatan	12	100.000.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengaturan dan Penataan Arus Lalu Lintas dan parkir dalam rangka hari-hari besar, pekan daerah dan hari-hari tertentu lainnya di kab. Kukar	Kab.Kukar			Jumlah Kegiatan Pengaturan dan Penataan	12	150.000.000	350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Fasilitasi Pengelolaan Retribusi Jasa Kepelabuhanan	Kab.Kukar			Jumlah Kecamatan	12	-	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Inventarisasi kegiatan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perhubungan	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1	-	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Peningkatan dan Pengendalian Disiplin Masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan	Tenggarong			Jumlah Kecamatan	10	100.000.000	200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Manajemen pengelolaan data dan informasi bidang perhubungan	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1	-	100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi/Software Sistem Informasi Manajemen dan website	Tenggarong			Jumlah Aplikasi	2	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Pemeliharaan dan Peningkatan Instalasi Jaringan dan Perangkat Keras/ Hardware IT	Tenggarong			Jumlah Jaringan dan Perangkat Keras/Hardware IT (6 Jaringan dan Perangkat Keras)	6	-	-	DINAS PERHUBUNGAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
			Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
			Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
	Penyusunan rencana induk/ Masterplan penerapan sistem informasi teknologi bidang Perhubungan	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Fasilitasi dan Koordinasi Teknis Bidang Perhubungan	Tenggarong			Jumlah bidang	4	-	600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Study Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kab.Kukar	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengembangan Sistem Informasi Geografis (GIS) Perhubungan	Tenggarong			Jumlah Software	1	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Survey LHR	Tenggarong			Jumlah Dokumen	1	-	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan Pelajar Pelopor Keselamatan UAI	Tenggarong			Jumlah Pelajar	50	-	150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Penunjang Kegiatan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Tenggarong			Jumlah piala WTN	1	-	400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Kab.Kukar	1)Prosentase jumlah kendaraan yang di uji terhadap jumlah kendaraan wajib diuji	100 Persen			2.450.000.000	950.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	2)Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) (<i>Indikator RPJMD</i>)	± 25 Menit / Kendaraan					DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	3)Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (Rata-Rata) (<i>Indikator RPJMD</i>)	56.667					DINAS PERHUBUNGAN
		Kab.Kukar	Prosentase peningkatan retribusi sektor perhubungan (PKB, Parkir, Tambat Kapal dll)	100 Persen					DINAS PERHUBUNGAN
	Fasilitasi Dan Koordinasi Forum lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab.Kukar			Jumlah Koordinasi dan sosialisasi	6	150.000.000	250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan material PKB, Parkir, dan retribusi tambat kapal	Tenggarong			jumlah paket material	3	200.000.000	700.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dan Perlengkapan Petugas Uji	Tenggarong			Banyaknya alat pengujian dan Perlengkapan petugas uji	11	-	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor (SIMPKB)	Tenggarong			Jumlah Aplikasi	1	100.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengujian Kendaraan Bermotor	Tenggarong			Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional (Mobil Uji Keliling)	1	2.000.000.000	-	DINAS PERHUBUNGAN
							12.519.122.137	25.042.740.160	DINAS PERHUBUNGAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja-PD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka untuk menangani isu-isu strategis yang telah ditentukan tersebut akan dirumuskan tujuan pelayanan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara periode tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan
- 2) Tujuan 1: Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah
- 3) Tujuan 2: Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan

Kemudian Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah yang hendak dicapai dari tujuan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran dari Tujuan 1: Meningkatnya Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan;
 - b) Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan; dan
 - c) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
- 2) Sasaran dari Tujuan 2: Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan.
- 3) Sasaran dari Tujuan 3: Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan; dengan indikator sebagai berikut:
 - a) Prosentase Penunjang Peningkatan Penerimaan PAD Bidang Perhubungan; dan

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

b) Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji.

Untuk lebih jelasnya mengenai Sasaran-Sasaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Meningkatkan Kapasitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perhubungan	1 Predikat Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan 2 Prosentase Peningkatan Layanan Perhubungan 3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	Menyediakan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Guna Meningkatkan Aksesibilitas Antar Wilayah	2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Perhubungan	1 Prosentase ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan
3	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perhubungan	3 Meningkatnya Penerimaan Retribusi Sektor Perhubungan	1 Prosentase penunjang penerimaan PAD Bidang Perhubungan 2 Prosentase Peningkatan Kelaikan Kendaraan Wajib Uji

3.2. Program dan Kegiatan

Rencana Pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun anggaran 2018 dituangkan ke dalam Program sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ;
7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;
8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
9. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas; dan
10. Program peningkatan kelayakan pengoprasian kendaraan bermotor.

Untuk usulan rencana kegiatan Perubahan tahun 2019 di Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, dapat dilihat dalam daftar/matrik rencana kerja Perubahan (Renja) tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Kertas Kerja Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

(Terlampir dihalaman selanjutnya)

BAB III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2019 adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu pada tahun anggaran 2019.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) dimaksudkan untuk merencanakan dan memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Perhubungan dan lintas satuan kerja disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi yang bersifat indikatif selama 1 (satu) tahun kedepan, dengan melanjutkan program kerja yang telah dilaksanakan. Selain itu juga sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan tahun 2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan usulan dari masyarakat yang menjadi skala prioritas dalam mewujudkan Pemerintahan *GOOD GOVERNANCE* and *CLEAN GOVERNMENT* dan Akuntabilitas Pelayanan Publik, yang sejalan dan sesuai kebutuhan. Dan mewujudkan pelayanan transportasi yang tertib, lancar, aman, nyaman serta harga terjangkau dalam rangka membuka isolasi daerah dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan program Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (2016-2021).

Lebih lanjut Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi (Permendagri 86/2017, pasal 343) :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, Kerangka ekonomi Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan / atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

BAB IV. Penutup

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*

Berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka, Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara 2019, diperlukan perubahan dalam rangka mengakomodasi hasil pengendalian dan evaluasi serta hasil audit laporan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 oleh BPK.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan Tahun Anggaran 2019 disusun dalam rangka sebagai panduan target dan kinerja pelaksanaan program pembangunan di bidang perhubungan tahun 2019, serta untuk menjadi arah dan pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan di bidang perhubungan bagi seluruh unit kerja dan stakeholder di lingkungan Dinas Perhubungan. Untuk itu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas bersama Sekretaris beserta Seluruh Kepala Bidang dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas Perhubungan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Perhubungan tahun 2019 dengan sebaik-baiknya;
2. Berkewajiban menjaga konsistensi antara RENJA dengan RENSTRA Dinas Perhubungan;
3. Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan RENJA Perubahan Dinas Perhubungan 2019, masing-masing Bidang, Kepala Seksi dan UPT di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan RENJA Tahun 2019.

Tenggarong, Juni 2019

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara

H. Heldiansyah, SH., M.H
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660810 198902 1 003

BAB IV. Penutup

*Rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019*